

# IMPLEMENTASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA RISIKO KECELAKAAN KERJA PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG

Wiyana

NPP.32.0148

Asdaf Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email : [wyanamasref17@gmail.com](mailto:wyanamasref17@gmail.com)

Pembimbing Skripsi : Dr. Agus Supriadi Harahap, M.Si.

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** the suboptimal implementation of the K3 SOP by firefighters in Padang City **Purpose** analyzing how K3 is implemented in the Padang City Fire Department for firefighters **Method :** This study uses a qualitative research design with a descriptive method and an inductive approach. Data collection techniques are carried out by observation, interviews, documentation and triangulation. In this study, informants were determined through the snowball sampling technique. Data analysis techniques are carried out by data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Results/Findings :** The results of the study were analyzed using the implementation theory of Edward III in Yulianto Kadji (2015: 64-69) which consists of 4 dimensions, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic appointment. In the communication dimension, what was done was quite good, only some improvements were needed through supporting activities. Resources such as competent officers and sufficient facilities and infrastructure will support K3. Regarding authority, it will be given to the squad leader, and must follow the existing SOP. Some of the obstacles found include limited personal protective equipment and budget, the need for increased technical training and ongoing socialization to the community, and the lack of detailed and detailed technical work guidelines in terms of improving occupational safety and health (K3) for firefighters. **Conclusion :** The results of the study indicate that the implementation of Occupational Safety and Health (OHS) has been carried out, but is still not optimal in its implementation, so improvements need to be made, especially in the SOP for Occupational Safety and Health (OHS) for officers. **Keywords: Occupational Safety and Health, Firefighters, SOP**

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP) :** belum optimalnya SOP K3 yang diterapkan oleh petugas pemadam kebakaran di Kota Padang. **Tujuan :** menganalisis bagaimana pengimplementasi K3 di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang pada petugas damkar. **Metode :** Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Dalam penelitian ini informan ditentukan melalui teknik *snowball sampling*, memperoleh informan sebanyak mungkin. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan :**

Hasil penelitian yang dianalisis menggunakan teori implementasi Edward III dalam Yulianto Kadji (2015 : 64-69) yang terdiri dari 4 dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan pengangkatan birokrasi. Dalam dimensi komunikasi yang dilakukan sudah cukup baik, hanya perlu beberapa peningkatan melalui kegiatan yang mendukung. Sumber daya seperti petugas yang berkompeten, dan tercukupinya sarana dan prasarana akan mendukung K3. Mengenai kewenangan, akan diberikan kepada danton regu, dan harus mengikuti SOP yang ada. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain keterbatasan alat pelindung diri serta anggaran, perlunya peningkatan pelatihan teknis dan sosialisasi kepada masyarakat yang berkelanjutan, serta belum tersusunnya pedoman kerja teknis secara rinci dan mendetail dalam hal meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi para petugas pemadam. **Kesimpulan :** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengimplementasian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah dilakukan, namun masih belum optimal dalam pelaksanaannya, sehingga perlu dilakukannya perbaikan terutama dalam SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada petugas.

**Kata kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Petugas Pemadam Kebakaran, SOP**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah melalui seluruh lembaga dan aparat di dalamnya adalah pihak yang wajib melaksanakan perlindungan masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya. Tujuan paling utama dari dibentuknya suatu negara adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk selalu mampu melindungi warga negaranya. Mengacu pada fungsi perlindungan oleh pemerintah, perlindungan masyarakat dapat didefinisikan sebagai seluruh upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga dan mengamankan masyarakat dari segala bentuk ancaman yang dapat mencelakakan mereka (Eviany & Sutiyo, 2023).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek penting yang harus menjadi perhatian utama dalam setiap bidang pekerjaan, terlebih pada pekerjaan yang memiliki risiko tinggi seperti profesi pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran secara langsung berhadapan dengan berbagai situasi berbahaya, mulai dari paparan api, asap beracun, runtuhnya bangunan, hingga penyelamatan dalam kondisi darurat lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara menyeluruh sangat dibutuhkan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan para petugas selama menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 mengenai SMK3. Menurut Husni (dalam Djatmiko, 2016:2), kesehatan dan keselamatan kerja (K3) secara ilmiah dipahami sebagai suatu bidang pengetahuan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit yang disebabkan oleh aktivitas atau lingkungan kerja.

Penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat (Phelps et al., 2018) bahwa faktor seperti usia, stres kerja, komitmen berlebih, rendahnya gaji, kurangnya dukungan dan penghargaan dari atasan maupun rekan kerja, serta minimnya peluang promosi, berpengaruh signifikan terhadap risiko cedera kerja pada petugas pemadam kebakaran. Petugas dengan karakteristik tersebut lebih berisiko mengalami cedera kerja dalam 12 bulan terakhir dibandingkan mereka yang tidak melaporkan cedera. Temuan ini menegaskan pentingnya memahami faktor demografis dan kondisi kerja untuk merancang program keselamatan kerja yang efektif dalam mencegah cedera di lapangan.

Kecelakaan kerja petugas damkar dapat terjadi dalam berbagai situasi, mulai dari saat penanganan kebakaran, penyelamatan jiwa, hingga kegiatan pelatihan dan latihan di lapangan.

Risiko tersebut dapat berasal dari berbagai faktor, seperti kelelahan fisik, kondisi lingkungan yang tidak terduga, ketidakpastian dalam tindakan, dan risiko yang terkait dengan bahan kimia atau kebakaran yang sulit dikendalikan. Informasi dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang dalam jumlah kecelakaan kerja yang terjadi pada beberapa tahun terakhir, pada tahun 2020 sebanyak 1 orang, tahun 2021 sebanyak 2 orang, tahun 2022 sebanyak 5 orang, dan tahun 2023 sebanyak 3 orang. Adapun kecelakaan kerja yang sering dialami oleh petugas pemadam kebakaran, yaitu tertusuk benda tajam seperti paku, besi, serpihan kaca, dan seng. Selain itu, kekurangan oksigen sehingga menyebabkan pingsan juga pernah dialami oleh petugas pemadam kebakaran. Jenis kecelakaan kerja lainnya yang pernah dialami adalah tertimpa besi, luka bakar akibat percikan api, tersengat tawon, terjatuh, dan berbagai kecelakaan lainnya.

Gambar 1.1 Grafik Kejadian Kebakaran dan Penyelamatan



Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang (2024)

Berdasarkan data yang diperoleh, menunjukkan bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah kejadian kebakaran dan penyelamatan. Tren peningkatan ini mengindikasikan tingginya intensitas kerja yang harus dihadapi oleh petugas pemadam kebakaran dari tahun ke tahun. Seiring dengan meningkatnya jumlah kejadian kebakaran dan penyelamatan, maka penerapan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang tepat dan sistematis menjadi suatu keharusan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir risiko kecelakaan kerja serta melindungi keselamatan dan kesehatan petugas selama menjalankan tugas di lapangan.

## 1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Petugas pemadam kebakaran dihadapkan pada risiko kecelakaan kerja yang sangat tinggi, mengingat mereka bekerja dalam lingkungan yang penuh dengan potensi bahaya, seperti api, asap beracun, runtuh bangunan, serta berbagai bahan berbahaya lainnya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan para petugas, terungkap bahwa mereka menghadapi berbagai risiko kecelakaan, mulai dari cedera akibat benda tajam seperti paku atau serpihan kaca, hingga kecelakaan yang disebabkan oleh paparan api dan gas berbahaya. Selain itu, petugas juga berisiko mengalami kelelahan fisik dan mental yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan.

Namun, meskipun tingkat risiko yang dihadapi oleh petugas sangat tinggi, laporan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi relatif minim. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara potensi risiko yang besar dan kejadian kecelakaan yang jarang terjadi. Salah satu faktor yang mungkin berkontribusi terhadap hal ini adalah tingkat kedisiplinan dan pengalaman petugas dalam menghadapi situasi berbahaya. Para petugas

umumnya telah terlatih dengan baik untuk menangani berbagai kondisi darurat dan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai langkah-langkah pencegahan untuk melindungi diri. Meskipun demikian, rendahnya angka kecelakaan tidak seharusnya dijadikan ukuran bahwa risiko telah sepenuhnya terkendali. Banyak petugas yang menyatakan bahwa meskipun kecelakaan tidak sering terjadi, mereka tetap merasa terpapar pada potensi bahaya yang signifikan setiap kali menjalankan tugas. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat penerapan prinsip K3 dan memberikan pelatihan yang lebih intensif guna meminimalkan potensi kecelakaan yang mungkin terjadi di masa depan. Konsekuensi medis yang paling sering terjadi akibat cedera petugas pemadam kebakaran adalah patah tulang, terkilir, dan memar di berbagai area tubuh. Menurut (Kubiak & Milczarczyk, 2023) Petugas pemadam kebakaran paling rentan mengalami cedera pada kelompok usia 26–35 tahun. Sebagian besar kecelakaan terkait dengan aktivitas selain intervensi petugas pemadam kebakaran, sehingga menarik perhatian pada perlunya mematuhi peraturan kesehatan dan keselamatan kerja, tidak hanya selama operasi penyelamatan dan pemadaman kebakaran.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Shafwani et al., 2015) yang berjudul Gambaran Risiko Pekerjaan Petugas Pemadam Kebakaran di Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran (DP2K) Kota Medan, dijelaskan bahwa petugas pemadam kebakaran menghadapi berbagai risiko baik saat dalam perjalanan menuju lokasi kejadian maupun saat berada di lokasi kebakaran. Risiko saat perjalanan antara lain risiko lalu lintas seperti tabrakan, sedangkan di lokasi kebakaran, risiko yang dihadapi mencakup paparan listrik, suhu ekstrem, api, pekerjaan di ketinggian, penggunaan peralatan pemadaman, serta risiko ledakan seperti backdraft dan flashover. Selain itu, kondisi bangunan yang terbakar, keberadaan benda tajam, serta kemungkinan adu fisik dengan warga juga menambah kompleksitas bahaya yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan secara umum menggambarkan potensi risiko yang mungkin terjadi pada petugas pemadam kebakaran. Meskipun memiliki fokus yang serupa, penelitian ini dilakukan di Kota Medan dan dalam konteks yang berbeda dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kota Padang, sehingga menjadi perbandingan yang relevan dalam melihat perbedaan kondisi kerja dan manajemen risiko antar daerah

Penelitian (Aini, 2016) Analisis Risiko Kerja Dan Upaya Pengendalian Bahaya Pada Petugas Pemadam Kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang dengan penelitian kualitatif Risiko petugas pemadam kebakaran dapat dilihat dari paparan potensi risiko dan dampak risiko. Paparan risiko pada petugas pemadam kebakaran merupakan bahaya potensial yang meliputi bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya listrik, bahaya mekanik dan bahaya biologi dan bahaya jatuh dari ketinggian. Bahaya-bahaya tersebut dapat mengakibatkan penyakit akibat kerja. Dalam penelitian ini tidak ditemukan bahaya biologi. Permasalahan yang diteliti risiko kerja dan bagaimana pengendaliannya dan berada di lokasi yang berbeda yaitu di Kota Semarang. Penelitian ini berlokasi di dinas pemadam kebakaran, dan terfokus pada kecelakaan kerja petugasnya.

Penelitian (Hanum et al., 2021) dengan penelitian deskriptif kualitatif dengan judul Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah Kota Padang Kebijakan K3 sudah ada namun belum disosialisasikan kepada tamu, kontraktor, pelanggan, pemasok secara maksimal. Risk Register dan Program K3 sudah dibuat namun belum dilaksanakan secara maksimal. Disimpulkan pelaksanaan SMK3 di RSI Siti Rahmah belum maksimal karena terbatasnya jumlah SDM pada Komite K3 sehingga karyawan melaksanakan rangkap jabatan dan tidak fokus hanya menerapkan program K3 saja. Lokus K3 yang dilakukan peneliti berada di rumah sakit. Membahas mengenai penerapan K3

di rumah sakit, sehingga sama sama memiliki permasalahan yang risiko kecelakaannya tinggi.

Penelitian (Hidayatun & Rodiyanto, 2021) Analisis Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Petugas Pemadam Kebakaran di Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kotamadya Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan penilaian risiko dilakukan pada seluruh tahapan proses pemadaman kebakaran yaitu dari awal sebelum berangkat atau siap berangkat ke TKP, perjalanan menuju lokasi kebakaran, dilokasi kebakaran hingga menuju kembali ke kantor atau suku dinas. Hasil analisis risiko petugas pemadam kebakaran yang menggunakan standart AS/NZS 4360, didapatkan hasil level risiko extreme sebanyak 11 risiko, level risiko high yaitu 3 risiko, level risiko middle yaitu 7 risiko dan level risiko low yaitu 3 risiko. Dari hasil analisis risiko yang dilakukan didapatkan bahwa level risiko yang tertinggi yaitu ada pada level extreme dan harus segera dilakukan pengendalian agar kecelakaannya pada petugas pemadam kebakaran bisa dikendalikan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Anasari Tri, 2024) Hubungan Pengetahuan Tentang K3 dan Kepatuhan Terhadap Prosedur dengan Risiko Bahaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada Petugas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Purbalingga menggunakan pendekatan deskriptif analitik dan menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat risiko bahaya sedang sebesar 72%, dengan tingkat kepatuhan terhadap prosedur sebesar 62%, dan pengetahuan yang baik mengenai K3 sebesar 68%. Penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan tentang K3 dan kepatuhan terhadap prosedur dengan tingkat risiko bahaya yang dihadapi petugas di lapangan. Temuan ini menegaskan pentingnya pengetahuan K3 dalam membentuk perilaku kerja yang aman serta menurunkan risiko kecelakaannya.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian dengan judul “*Implementasi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Risiko Kecelakaan Kerja Petugas Pemadam Kebakaran Kota Padang*” memiliki kebaruan ilmiah dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini terinspirasi oleh sejumlah studi sebelumnya yang menyoroti risiko kerja dan penerapan keselamatan serta kesehatan kerja (K3) pada petugas pemadam kebakaran. Shafwani et al. (2015) menggambarkan berbagai risiko yang dihadapi petugas damkar di Kota Medan baik dalam perjalanan maupun saat berada di lokasi kebakaran. Aini (2016) menganalisis potensi risiko dan bahaya kerja di Kota Semarang, dengan fokus pada jenis-jenis risiko namun tidak mengaitkannya secara mendalam dengan implementasi sistem K3. Penelitian Hanum et al. (2021) membahas penerapan SMK3 di rumah sakit, menunjukkan bahwa risiko kerja tinggi juga terjadi di sektor non-damkar, namun pendekatannya berbeda. Sementara itu, Hidayatun & Rodiyanto (2021) menilai level risiko berdasarkan standar AS/NZS 4360 di Jakarta Timur, namun belum menyinggung secara spesifik peran komunikasi dalam pelaksanaan K3. Anasari Tri (2024) menghubungkan tingkat pengetahuan dan kepatuhan terhadap prosedur K3 dengan tingkat risiko di Purbalingga, namun belum mengaitkannya dengan dinamika komunikasi organisasi.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada implementasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada petugas pemadam kebakaran di Kota Padang, dengan menyoroti bagaimana sistem K3 dijalankan dalam menghadapi risiko kecelakaannya yang tinggi. Meskipun potensi kecelakaannya sangat besar, seperti paparan api, suhu ekstrem, dan kondisi medan yang berbahaya, tingkat kecelakaannya yang terjadi relatif minim. Hal ini mendorong peneliti untuk menelaah lebih dalam bagaimana penerapan K3 dilakukan secara efektif di lapangan. Kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menyoroti peran komunikasi internal, khususnya dalam dimensi transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi K3, sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan K3. Selain itu,

penelitian ini juga dianalisis menggunakan teori implementasi dari George C. Edward III yang terdiri dari empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi, dan juga mempertimbangkan karakteristik lokal Kota Padang yang memiliki tantangan geografis dan kepadatan pemukiman, sehingga menjadi kontribusi baru dalam pengembangan model K3 yang adaptif dan kontekstual di wilayah berisiko tinggi.

## 1.5 Tujuan

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang dalam mengurangi kecelakaan kerja dengan pengimplementasian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada petugasnya.

## II. METODE

Menurut Simangunsong (2017), metode penelitian merupakan teknik sistematis yang digunakan untuk memperoleh dan menganalisis data demi mencapai tujuan studi. Penelitian ini memakai metode kualitatif karena peneliti bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan selama proses penelitian berlangsung, sesuai dengan esensi dari pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan data terlebih dahulu, kemudian diuraikan melalui proses analisis serta dirumuskan berdasarkan permasalahan yang ditemukan secara langsung di lapangan. Menurut Sugiyono (2023:18), metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci.

Untuk memperoleh data yang relevan dalam penelitian, peneliti perlu mengidentifikasi berbagai sumber data yang dapat mendukung keakuratan informasi. Menurut Arikunto (2010), sumber data dapat berasal dari tiga jenis, yaitu person (individu yang memberikan informasi langsung), place (tempat yang diamati untuk dianalisis), dan paper (dokumen atau arsip yang memuat informasi tertulis maupun visual). Dengan menggunakan teknik *snowball sampling* dalam informan, sehingga mendapatkan informasi sebanyak banyaknya sesuai bidang. Menurut Creswell (2012:146), *snowball sampling* merupakan prosedur di mana partisipan diminta merekomendasikan partisipan lainnya untuk diteliti. Teknik ini efektif digunakan untuk menjangkau pihak-pihak yang terlibat langsung di dalamnya.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2023:321–330), analisis data kualitatif dilaksanakan secara interaktif melalui empat tahapan utama, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, yang sering kali dikombinasikan dalam bentuk triangulasi untuk meningkatkan validitas data. Tahap reduksi data melibatkan proses pemilahan, penyederhanaan, serta pemfokusan pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau diagram guna mempermudah pemahaman terhadap pola-pola yang muncul. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang bersifat sementara dan akan diuji secara berkelanjutan hingga didukung oleh bukti-bukti yang kuat, sehingga menghasilkan kesimpulan yang valid dan kredibel. Proses ini digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) oleh petugas pemadam kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang. Hasil penelitian yang dilakukan pada Bulan Januari 2025 di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang dianalisis menggunakan teori implementasi dari George C. Edward III yang terdiri dari empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berkaitan dengan implementasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi petugas pemadam kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung pada bulan Januari 2025 guna menilai sejauh mana kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) telah dilaksanakan dan apakah implementasinya telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berdasarkan sudut pandang peneliti serta merujuk pada teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III dalam Yulianto Kadji (2015:64–69), yang menekankan pada empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat dimensi ini digunakan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang.

#### 3.1 Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Petugas Pemadam Kebakaran Kota Padang

Menurut Mangkunegara (2013:163), dimensi dan indikator keselamatan dan kesehatan kerja (K3) mencakup beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam lingkungan kerja. Pertama, kondisi tempat kerja mencakup penataan dan penyimpanan bahan berbahaya serta ruang kerja yang terlalu padat, yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan. Kedua, pengaturan sirkulasi udara yang buruk, seperti ruangan yang kotor, berdebu, dan berbau tidak sedap, juga menjadi faktor yang memengaruhi kesehatan pekerja. Ketiga, pencahayaan yang tidak sesuai atau kurang tepat dapat mengganggu kenyamanan dan produktivitas kerja. Keempat, penggunaan peralatan kerja perlu disertai dengan pemberian alat pelindung diri (APD) dan pemahaman terkait penggunaan alat, termasuk penanganan terhadap peralatan yang sudah rusak atau usang. Kelima, kondisi fisik dan mental pegawai harus senantiasa dipantau untuk memastikan mereka dalam keadaan yang siap dan aman saat bekerja. Dalam penelitian (Han & Linton, 2008) Petugas pemadam kebakaran kerap terpapar berbagai zat berbahaya di lingkungan kerja, termasuk bahan karsinogenik, serta menghadapi kondisi ekstrem seperti suhu tinggi, tingkat kebisingan yang tinggi, dan tekanan fisik maupun mental. Kondisi ini membuat mereka rentan terhadap berbagai gangguan kesehatan, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, serta gangguan pada sistem reproduksi. Oleh karena itu, penting untuk mengelola lokasi kebakaran secara efisien agar petugas yang mengalami kelelahan dapat memperoleh waktu istirahat yang memadai, sekaligus mencegah risiko heat stroke dan kelelahan berlebih melalui penanganan medis yang cepat, seperti pemberian cairan. Di samping itu, dibutuhkan program kebugaran yang terstruktur untuk mendukung peningkatan dan pemeliharaan kesehatan fisik petugas, serta pengaktifan program pemeriksaan kesehatan secara rutin guna mendeteksi risiko penyakit jantung dan kondisi kesehatan lainnya sejak dini. Dalam hal pengimplementasiannya penulis menggunakan teori Edward III yang telah penulis analisis sebagai berikut :

##### 3.1.1 Komunikasi

Implementasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang mencakup aspek transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Informasi K3 disampaikan melalui apel, rapat, briefing, pelatihan, dan program sosialisasi seperti “*Damkar Goes to School*” dimana penekanan mengenai pentingnya penggunaan APD saat bertugas bagi para petugas. Namun, penyuluhan belum merata dan masih ada masyarakat yang kurang paham prosedur keselamatan. Dari sisi kejelasan, aturan sudah dituangkan dalam SOP dan didukung

sanksi, tetapi rincian penggunaan APD belum tertulis lengkap, hanya disampaikan lewat pelatihan. Untuk konsistensi, dinas pemadam kebakaran menjaga standar waktu tanggap 15 menit dengan sistem zonasi WMK sesuai dengan Permendagri No. 114 Tahun 2018 mengenai SPM Kebakaran Daerah, namun keterbatasan jumlah pos masih membuat daerah terpencil kurang terlayani. Perlu peningkatan sosialisasi, perbaikan SOP, dan penambahan pos agar implementasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) lebih optimal.

Gambar 3.1 Briefing dan Latihan Pemadaman



Sumber : dokumentasi oleh peneliti dan dinas damkar (2025)

### 3.1.2 Sumber Daya

Implementasi kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, kelengkapan peralatan, serta kewenangan pelaksana di lapangan. Dari aspek sumber daya manusia, meskipun terdapat program pelatihan berkelanjutan guna meningkatkan kompetensi petugas, jumlah personel yang terbatas, dengan banyak pos hanya diisi empat personel, tidak sesuai standar enam orang per unit, menjadi kendala signifikan. Selain itu, pembentukan relawan pemadam kebakaran (redkar) sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 114 Tahun 2018 belum terlaksana, sehingga pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran masih minim. Dari segi anggaran, keterbatasan dana mengharuskan pengalokasian prioritas dalam pengadaan sarana dan prasarana, sehingga beberapa petugas terpaksa melengkapi perlengkapan keselamatan secara mandiri. Kondisi ini berdampak pada belum terpenuhinya kebutuhan peralatan secara optimal, seperti ketiadaan mobil tangga dan ambulans, meskipun Markas Komando telah memiliki sarana yang relatif lengkap sesuai standar, dimana belum terpenuhinya Permendagri Nomor 122 Tahun 2018 mengatur tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah. Dalam hal kewenangan, komandan pleton (danton) diberikan otoritas untuk mengambil keputusan secara mandiri dan cepat dalam situasi darurat, termasuk mengatur pembagian tugas, mengarahkan penggunaan alat pelindung diri, serta memastikan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan. Pemberian kewenangan ini menjadi faktor krusial dalam menjamin kelancaran operasional dan responsivitas penanganan kebakaran.

Tabel 3.1 Sarana dan Prasarana Damkar

No	Kebutuhan	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Bangunan Kantor	Kantor dan Markas Komando	1 Unit
		Pos Wilayah Manajemen Kebakaran	6 Unit
2.	Armada	Mobil Pemadam Kebakaran	14 Unit
		Mobil Rescue	1 Unit
		Mobil Pompa Portable	3 Unit
		Mobil Fire Commando	1 Unit
		Mobil Operasional	6 Unit
3.	Personil	Masker	60 buah
		Sarung tangan	60 pasang
		Fire Helmet	40 unit
		Breathing apparatus (SCBA)	11 unit
		Sepatu lapangan	Lengkap / personel
		Fire jacket	Lengkap / personel
		Scuba	2 set
		Baju tahan panas	15 stel
		Baju tahan api	2 stel
4.	Rescue Sets RS-1	Combi Tool LKS 35 EN.	1 Set Cukup
		Chain Set KSV 8.	1 Set Cukup
		Rescue Ram LZR 12/300.	1 Set Cukup
		GO 2L (engine Power)	1 Set Cukup
		Air Lifting Bag KPI-17,32	1 Set Cukup
		Hooligan tools	1 Set Cukup
		Power Cutter K 650	1 Set Cukup
		Pry Axe	1 Set Cukup
		Blower	2 Set Cukup
		Paratech Air Gun 40.	1 Set Cukup
		CG Cutter.	1 Set Cukup
		Tac Stick	1 Set Cukup
		Lampu sorot	1 Set Cukup
		Spreader	1 Set Cukup
		Perahu Karet	2 unit
		Ambulance	Belum tersedia
Mobil tangga	Belum tersedia		

Sumber : Dinas pemadam kebakaran kota Padang (2022)

### 3.1.3 Disposisi

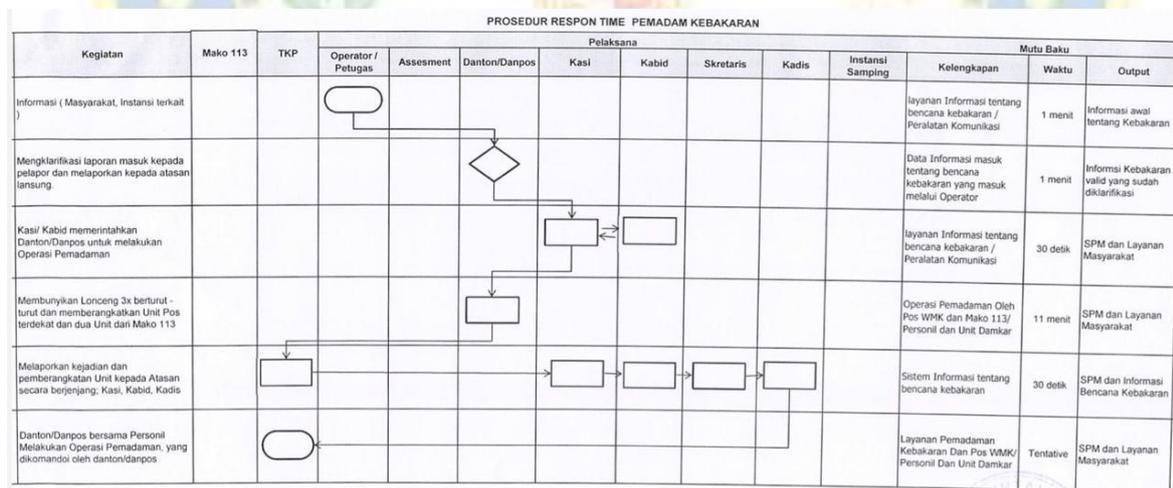
Pelaksanaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang sangat dipengaruhi oleh proses pengangkatan birokrasi yang selektif dan sistematis serta pemberian insentif yang memadai. Proses rekrutmen petugas damkar dilakukan melalui jalur resmi seperti CPNS dan PPPK, dengan penekanan pada pelatihan dasar yang intensif untuk membekali petugas, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang non-kebakaran, agar siap menjalankan tugas operasional secara profesional dan bertanggung jawab. Hal ini tercermin dari prestasi petugas yang berhasil meraih juara 1 dalam kompetisi Survival

National Firefighter Skill Competition (NFSC) di Bontang pada Maret 2025, menandakan keberhasilan mekanisme pengangkatan dan pembinaan yang berkelanjutan. Selain itu, pemberian insentif melalui penghargaan pegawai teladan dan fasilitas jaminan kesehatan berperan penting dalam menjaga motivasi dan kinerja petugas yang bekerja dalam kondisi penuh risiko. Meskipun beberapa petugas kontrak belum menerima tunjangan tambahan, upaya penghargaan ini secara nyata meningkatkan semangat kerja dan profesionalisme mereka. Dengan demikian, pengangkatan birokrasi yang tepat dan pemberian insentif yang konsisten merupakan fondasi utama dalam membentuk aparatur yang kompeten dan berdedikasi tinggi demi tercapainya tujuan keselamatan dan kesehatan kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang.

### 3.1.4 Pengangkatan Birokrasi

Pelaksanaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang sangat bergantung pada keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman kerja sistematis bagi seluruh petugas. SOP yang ditetapkan pada tahun 2024 mengatur langkah-langkah operasional mulai dari penerimaan laporan, mobilisasi unit dan personel, pelaksanaan pemadaman, hingga evaluasi pascakejadian, bertujuan menciptakan pelaksanaan tugas yang terstruktur, efisien, dan sesuai standar keselamatan. Meskipun SOP memberikan panduan yang jelas, terdapat kebutuhan untuk memperjelas rincian teknis khususnya terkait penggunaan alat pelindung diri (APD) dan pemanfaatan sarana prasarana di lapangan agar efektivitas implementasi dapat ditingkatkan. Keberadaan SOP ini tidak hanya memudahkan koordinasi dan pengawasan, tetapi juga memastikan keselamatan kerja para petugas selama bertugas. Namun perlu perbaikan didalamnya, SOP belum mengatur secara detail dan merinci mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pada petugasnya.

Gambar 3.2 SOP *Response Time* Pemadam Kebakaran



Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang (2024)

Selain itu, implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh fragmentasi tanggung jawab yang melibatkan berbagai instansi terkait, seperti Basarnas, Polisi, BPBD, dan PLN, yang masing-masing memiliki peran spesifik dalam penanggulangan kebakaran dan bencana. Koordinasi antar lembaga ini dijalankan melalui mekanisme komunikasi dan pusat kendali yang terintegrasi, sehingga setiap pihak memahami peran dan tugasnya secara jelas dalam mendukung operasi lapangan. Meskipun menghadapi tantangan seperti perbedaan prosedur

dan keterbatasan komunikasi, upaya peningkatan koordinasi melalui pelatihan dan pertemuan rutin terus dilakukan guna meningkatkan efektivitas penanganan darurat. Sinergi antarinstansi ini menjadi faktor krusial dalam memastikan pelayanan pemadam kebakaran berjalan cepat, aman, dan profesional sesuai dengan tujuan kebijakan.

### **3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penelitian ini menemukan sejumlah hal penting terkait pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada petugas pemadam kebakaran di Kota Padang. Temuan ini memberikan gambaran bahwa meskipun pekerjaan mereka penuh risiko dan tantangan, ada kekuatan besar yang tumbuh dari dalam organisasi dan individu yang terlibat di dalamnya. Pertama, meskipun tugas pemadam kebakaran sangat berisiko seperti menghadapi api, runtuh bangunan, hingga situasi darurat yang tak terduga, nyatanya angka kecelakaan kerja di lapangan cukup rendah. Hal ini menunjukkan bahwa para petugas sudah memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya keselamatan, serta menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat saat bertugas. Dengan kata lain, meskipun bekerja di medan yang berat, mereka mampu menjaga keselamatan diri dan tim dengan baik. Kedua, keterbatasan jumlah personel dan fasilitas penunjang tidak menjadi penghalang utama. Justru, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki menjadi modal penting dalam menjaga kinerja dinas tetap optimal. Para petugas menunjukkan kemampuan, keterampilan, dan ketangguhan yang luar biasa dalam menangani berbagai situasi darurat. Ini membuktikan bahwa dengan SDM yang kompeten dan terlatih, berbagai keterbatasan bisa diatasi. Ketiga, semangat pengabdian dan jiwa kemanusiaan para petugas menjadi kekuatan moral yang sangat besar. Walaupun insentif yang mereka terima belum merata dan dirasa belum sebanding dengan risiko kerja yang dihadapi, mereka tetap melaksanakan tugas dengan dedikasi tinggi. Bagi mereka, membantu masyarakat dan menyelamatkan nyawa adalah panggilan hati yang lebih besar dari sekadar imbalan materi.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan K3 di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang tidak hanya bergantung pada kelengkapan alat atau kebijakan yang tertulis, tetapi juga pada kualitas manusia di balik seragam, yang bekerja dengan hati, disiplin, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Ini menjadi pelajaran penting bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas sering kali menjadi fondasi utama dalam pekerjaan yang penuh risiko.

### **3.3 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (Opsional)**

Penelitian ini juga menemukan beberapa hal menarik terkait pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang. Pertama, meskipun SOP telah disusun berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 73 Tahun 2022 dan dituangkan dalam SK Kepala Dinas No. 1- 8 Tahun 2024, terdapat kebutuhan untuk penyempurnaan detail teknis, terutama terkait penggunaan alat pelindung diri (APD) dan prosedur operasional di lapangan. Kedua, koordinasi lintas instansi seperti BPBD, Basarnas, PLN, dan Kepolisian telah berjalan baik, namun masih dihadapkan pada tantangan berupa perbedaan prosedur dan kendala komunikasi, yang memerlukan peningkatan melalui pelatihan terpadu. Ketiga, keterbatasan personel menyebabkan banyak petugas merangkap tugas di lapangan, meskipun Permendagri No. 114 Tahun 2018 menetapkan satu unit kendaraan idealnya dioperasikan oleh enam personel. Keempat, program pembentukan relawan pemadam kebakaran (Redkar) sebagaimana diatur dalam Permendagri tersebut belum direalisasikan, dan upaya pemberdayaan masyarakat masih difokuskan pada sosialisasi seperti program “Damkar Goes to School”. Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun pelaksanaan K3

berjalan cukup baik, masih diperlukan penguatan dalam aspek teknis, koordinatif, dan partisipatif agar implementasi kebijakan lebih optimal dan sesuai regulasi.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada risiko kecelakaan kerja petugas pemadam kebakaran di Kota Padang telah berjalan cukup efektif, yang ditunjukkan oleh rendahnya angka kecelakaan kerja di lapangan. Hal ini mencerminkan adanya kesadaran tinggi dari petugas serta komitmen kelembagaan yang kuat dalam menjalankan prosedur keselamatan. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam hal keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya perincian teknis dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), serta pemerataan sosialisasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas personel, penyempurnaan regulasi teknis, serta penguatan peran masyarakat agar implementasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada petugas dapat terlaksana secara lebih optimal, menyeluruh, dan berkelanjutan.

**Keterbatasan Penelitian.** Dalam penelitian ini, penulis menyadari adanya beberapa keterbatasan yang dapat memengaruhi kelengkapan hasil yang diperoleh. Salah satu keterbatasan utama adalah terbatasnya waktu pelaksanaan penelitian, sehingga pengumpulan data hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Hal ini berpengaruh pada ruang lingkup observasi dan kedalaman informasi yang dapat digali dari para informan. Selain itu, keterbatasan juga terdapat pada akses terhadap informasi tertentu yang bersifat internal atau teknis, sehingga tidak semua data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara menyeluruh. Oleh karena itu, hasil penelitian ini masih memiliki ruang untuk pengembangan lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya dengan cakupan yang lebih luas dan waktu yang lebih memadai.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Arah masa depan penelitian ini menyadari bahwa temuan yang dihasilkan masih bersifat awal dan belum mencakup seluruh aspek secara mendalam. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi yang sama, yaitu Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, dengan fokus pada aspek-aspek tertentu seperti efektivitas program pelatihan, evaluasi implementasi SOP secara menyeluruh, atau peran pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Penelitian lanjutan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan memperkuat dasar pengambilan kebijakan di masa mendatang.

#### V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

Aini, A. N. (2016). Analisis Risiko Kerja Dan Upaya Pengendalian Bahaya Pada Petugas Pemadam Kebakaran Di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(1), 277–283.

- Anasari Tri, T. Y. (2024). *Hubungan Pengetahuan Tentang K3 dan Kepatuhan Terhadap Prosedur dengan Risiko Bahaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada Petugas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Purbalingga*. XX(2), 98–107.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, J. W. (2012). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.)*. Boston, MA: Pearson
- Djatmiko.2016. *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Jakarta: PT Binneka
- Han, A. R., & Linton, J. A. (2008). Cardiovascular disease, cancer and reproductive hazards in firefighters. *Journal of the Korean Medical Association*, 51(12), 1097–1102. <https://doi.org/10.5124/jkma.2008.51.12.1097>
- Hanum, N. Z., Yusman, R., & Rahmadiani, Y. (2021). Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah Kota Padang. *Jurnal Riset Hesti Medan Akper Kesdam I/BB Medan*, 6(1), 69. <https://doi.org/10.34008/jurhesti.v6i1.235>
- Hidayatun, Y. N., & Rodiyanto, E. (2021). Analisis Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Petugas Pemadam Kebakaran di Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kotamadya Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021. *Indonesian Scholar Journal of Medical and Health Science*, 1(04), 148–152. <https://dohara.or.id/index.php/hsk/article/view/90>
- Kubiak, T., & Milczarczyk, T. (2023). *OF THE POLISH STATE FIRE SERVICE OFFICERS*. 74(6), 469–477.
- Mangkunegara, A. A. A. P. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Phelps, S. M., Drew-Nord, D. C., Neitzel, R. L., Wallhagen, M. I., Bates, M. N., & Hong, O. S. (2018). Characteristics and Predictors of Occupational Injury Among Career Firefighters. *Workplace Health and Safety*, 66(6), 291–301. <https://doi.org/10.1177/2165079917740595>
- Shafwani, R., Lubis, H. S., & Salmah, U. (2015). Gambaran Risiko Pekerjaan Petugas Pemadam Kebakaran di Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran (DP2K) Kota Medan. *Lingkungan Dan Keselamatan Kerja*, 1(1), 1–10.
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 mengatur Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.
- Permendagri Nomor 122 Tahun 2018 mengatur tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah
- Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- Peraturan Walikota ( PERWALI ) Kota Padang Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran
- Simangunsong F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Sugiyono, 2023. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta